

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Indrayana, Denny. 2017. *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media.
- Latuconsina, M. Nur. (2020). *Independensi KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Kubuku.
- Muqoddas, Busyro. (2007). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Kajian Hukum, Politik, dan Etika*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Soehino. (1985). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiawan, Irfan. 2024. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Tarigan, R. S. 2024. *Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

Jurnal

- Afif, Z. 2018. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Dialog*, 7(1).
- Aireen, N. F. 2020. “Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).” Skripsi, IAIN Bone.
- Alfidyah, M. 2025. “Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1(1), 1–9.
- Asyikin, N., dan A. Setiawan. 2020. “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK.” *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Bagaswara, M. A., S. Suharso, D. A. S. Dewi, dan H. M. Syafingi. 2022. “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan).” *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44.
- Benuf, K., dan M. Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Fadilla, D. I., A. F. Azhari, dan M. SH. 2025. “Analisis Terhadap Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Fadhil, M. 2019. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi." *Al Ahkam*, 15(2), 7–36.
- Fahmiron, F. 2016. "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Litigasi*, 17(2), 3467–3515.
- Gusman, D. 2024. "Penambahan Lembaga Kementerian sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara." *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 655–665.
- Hidayat, D. R., P. A. Kana, dan R. Haryani. 2020. "Analisis Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." *Krisna Law*, 2(1), 37–52.
- Langingi, S., dan R. A. Bakar. 2025. "Pengawasan terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi dan Akuntabilitas." *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4), 749–766.
- Maskur, M., et al. 2025. "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 66–74.
- Pudjiastuti, D. 2023. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Independensi Hakim di Indonesia: Application of Accountability Principles in the Independence of Judges in Indonesia." *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112–122.
- Pulungan, R. A. R., dan L. T. Alw. 2022. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip *Checks and Balances* antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280–293.
- Rais, M. T. R. 2022. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31.

- Ramadhan, M. R., dan N. Prasetyoningsih. 2024. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Ramadhana, R. 2025. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." Skripsi, IAIN Parepare.
- Rezah, F. S., dan A. T. Sapada. 2026. "Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang dalam Perspektif Kelembagaan." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 249–260.
- Ridwan, R., A. L. Citrawan, B. P. M. Jaya, A. Ahdad, I. G. Hernata, dan M. Muyassaroh. 2022. "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang." *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 171–178.
- Romaliani, K. 2020. *Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Disertasi, IAIN Padangsidimpuan.
- Simamora, J. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Sosiawan, U. M., dan H. A. M. R. Indonesia. 2019. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517–538.
- Sugiman, S. 2020. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Umam, K., dan N. F. Hikmah. 2020. "Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).

- Wahyuningrum, K. S., H. S. Disemadi, dan N. S. P. Jaya. 2020. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.
- Wiryadi, U., dan E. D. Martono. 2024. “Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(1).
- Yusyanti, D. 2015. “Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum.” *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247–258.
- Zahra, A., C. A. T. Charisma, M. A. R. Azaby, dan S. N. Fadilah. 2022. “Teori Pemisahan Kekuasaan *Trias Politica* dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Zuhri, B. 2020. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen.” *Jurnal Ensiklopedia*, 3(5).

Peraturan Perundangan-undangan

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23.